

DAFTAR PUSTAKA

- Adimad, M. (2020, November 17). Retrieved from www.pajak.go.id:https://www.pajak.go.id/id/artikel/dua-sisi-withholding-tax-system-di-indonesia
- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Administrasi Publik*, Volume 1, No.1.
- Anwar, S. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: GloraMadani Press.
- Fisher, J. B. (1984). *Environmental Psychology*. holt, Rinerhart, and Winston.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media.
- Indradit, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Lunenburg, F. C. (2012). *Compliance Theory and Organizational Effectiveness*. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCHOLARLY ACADEMIC INTELLECTUAL DIVERSITY*, 14(1). Retrieved from <https://dokumen.tips/documents/lunenburg-fred-c-compliance-theory-and-organizational-effectivenes-ijsaid-v14.html>
- Maman Suherman, M. A. (n.d.). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap KepatuhanWajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi,Auditing dan Informasi*, 99-115.
- Pajak, D. J. (2017). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2017 tentang Penetapan Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

- Pajak, D. J. (2018). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2018 tentang Penetapan Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Pajak, D. J. (2019). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Pajak, D. J. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Pajak, D. J. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sekar Asri Nurillah, N. S. (n.d.). *Compliance Cost Analysis in Post Implementation of Electronic Withholding Tax Slip (Study on E-Bupot Phase I User Taxpayers)*. ICASPGS: International Conference on Administrative Science, Policy, (Universitas Indonesia).

- Sirait, A. M. (2021). *KTТА : Tinjauan Atas Penerapan Aplikasi E-Bupot Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Pada tahun 2020*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Subejo. (2010). *Penyuluhan Pertanian Terjemahan dari Agriculture (Edisi 2)*.
- Sugiyanto. (2014). *Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang (Studi Pada DPPKAD Kota Tanjungpinang)*. . E-Journal.
- Sule, S. &. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Media Group.
- Supriyatna, V. M. (n.d.). Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna dan Tingkat Kepentingan Penerapan Sistem Informasi DJP Online dengan KerangkaPIECES. *Khazanah Informatika*, Vol.3, No.2.
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.